

Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia

Telaah Singkat *Civil Society* Dalam Pendekatan Sosiologi Politik

Syamsul Mujahidin

Syamsulmujahidin1@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengurai konsep masyarakat madani dan dikaitkan dengan politik demokrasi di Indonesia. Secara historis, masyarakat madani merupakan konsepsi yang memiliki epistemologi berbeda bila dikaitkan dengan konsep civil society di Barat. Namun demikian, konsep ini merupakan terma yang dapat disepadankan dengan civil society, dengan konstruksi teoritis yang memuat prinsip dan nilai-nilai keislaman dan dikontekstualisasi dengan realita kehidupan demokrasi di Indonesia. Kajian ini memakai perspektif sekaligus pendekatan sosiologi politik. Kajian ini menarik beberapa kesimpulan. pertama, Masyarakat Madani mengandung berbagai unsur penting yang menyangkut tatanan peradaban masyarakat, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengontrol saja. Namun dalam kasus ini, terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep Masyarakat Madani harus dimulai dari membentuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme, kerjasama antar golongan. Kedua, masyarakat madani dapat menjadi ruang publik yang tidak berada pada jalur formal untuk kembali menyuarakan keinginan dan harapan rakyat secara lebih tegas dan berani. Masyarakat Madani memberikan ruang reformasi, maka demikian juga Masyarakat Madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrim yang bernama reformasi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Masyarakat Madani, Demokrasi, Politik Islam.*



A. Pendahuluan

Sebenarnya, pembahasan Masyarakat Madani ini sudah agak sedikit using untuk dijadikan topik hangat pada saat sekarang ini, karena selain konsep tersebut ramai dibicarakan pada masa-masa akhir Orde Baru, banyaknya buku-buku, seminar hingga diskusi kecil di berbagai forum ilmiah yang membahas tentang Masyarakat Madani, juga dikarenakan konsep tersebut sekarang terlihat remang dan hanya berkisar dalam kerangka teoritis kaum pembaharu masa lalu. Maka yang menjadi hajat sekarang ini adalah menghangatkan kembali dengan membawa topik ini ke dalam diskusi-diskusi kenegaraan dalam pendekatan sosiologi politik di Indonesia, khususnya SPPI. Dan marilah sedikit merefleksikan fenomena perjuangan transformasi konsep Masyarakat Madani, integrasinya dengan agama dan budaya serta politik demokrasi di Indonesia.

Masyarakat Madani adalah suatu rumusan peradaban kebangsaan yang dianggap ideal bagi lingkup kehidupan modern, mulai dari sistem demokrasi, pemeliharaan budaya hingga aspek-aspek penting kemanusiaan. Rujukan ini tentunya melibatkan para pemikir dan pakar untuk mengkondisikan Kembali konsepsi Masyarakat Madani ketika harus dihadapkan dengan corak kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Bagaimanapun juga, masyarakat Indonesia yang telah lama terdidik dan terformulasi secara ekstrim dalam segala lini kehidupan berbangsa oleh kekuatan rezim otoriter orde baru harus banyak mengemas kembali perspektif kebangsaan sebelum merangkul Masyarakat Madani sebagai paradigina baru secara utuh. Seperti dikatakan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim, pencetus pertama istilah Masyarakat Madani ini, bahwa manifestasi kritis Masyarakat Madani adalah akibat dari kemelut yang diderita umat Islam semasa baik di Asia maupun di Afrika, seperti meluasnya keganasan, sikap melampaui batas dan tidak tasamuh, kemiskinan dan kemelaratan, ketidakadilan dan kebejatan social, kelesuan intelektual dan kemuflian budaya. Seolah-olah umat terjerumus pada kezaliman dari kediktatoran.



Para pemikir bangsa, melalui kesadaran intelektualitas dan religiusitas ingin sepenuhnya menempuh dimensi baru kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merujuk kepada paradigma Masyarakat Madani ini. Setelah keluar dari rezim orde baru, terlihat berbagai kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia menuju kondisi keadilan dan kesejahteraan. Seperti dikatakan oleh Nurcholis Madjid, bahwa terbentuknya Masyarakat Madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan social bagi seluruh ,rakyat Indonesia. Namun sejauh ini, konsepsi yang mewakili cita-cita kebangsaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam wajah budaya, sosial politik dan beberapa aspek penting trasformasi Masyarakat Madani di Indonesia. Maka sekali lagi, hajatn utama dari persoalan ini adalah mengingatkan kembali topik Masyarakat Madani yang telah hampir terlupakan dalam wacana-wacana akademis, mencari akar problematika aktualisasi, atau sedikit menelaah kembali proses-proses integratif antara Masyarakat Madani dengan kultur Masyarakat dalam dimensi agama, budaya dan sosial politik di indonesia.

B. Masyarakat Madani dan Civil Society

Istilah Masyarakat Madani dimunculkan pertama kali oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam simposium nasional, sebuah forum ilmiah pada acara festival Istiqlal, 26 September 1995¹. Istilah Masyarakat Madani pun sebenarnya masih tergolong baru, yaitu hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas, seorang filosof dari negeri Jiran Malaysia². Istilah ini dikemudian hari mendapat legitimasi dari beberapa tokoh intelektual Indonesia termasuk Cak Nur dalam sebuah artikel berjudul "Menuju Masyarakat Madani".

Istilah ini pada awalnya masih dimunculkan dalam forum-forum ilmiah oleh beberapa tokoh intelektual saja seperti Cak Nur, Amien Rais dan lain-

¹ Disaikan dari naskah pidato anwar Ibrahim "*Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani*". Lihat enjelasan selengkapnya dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 93-94

² Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah penjajakan awal* (Jurnal Paramadina, vol. 1, no. 2, 1999), hlm. 16



lain, namun lambat laun terdengar pula dari pembicaraan dan orasi para politikus negeri ini, termasuk pula sebagai salah satu poin kampanye bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita saat sekarang ini. Urgensi dari terma yang diangkat ini adalah, bagaimana Masyarakat Madani sebagai konsep bermasyarakat yang baik yang tercipta dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, sebagai bingkai keragaman yang ada, dari agama dan budaya, hingga system politik demokrasi pancasila.

Sedangkan Civil Society, apabila dirunut dari istilah munculnya dan sebagai sebuah konsep, berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya mulai dari Cicero (106-43 SM) yang menggunakan istilah *societis civilis* dalam filsafat politiknya³. Dalam tradisi Eropa sampai dengan abad ke-18, istilah Civil Society masih disepadankan dengan pengertian Negara atau The State, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Artinya, Civil Society sebagai masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Di zaman modern istilah Civil Society dihidupkan dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf sosial antara lain Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jeans- Jacques Rousseau (1712-1778), untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik⁴.

Salah satu pandangan mengenai konsep Civil Society tercatat dalam sejarah barat digunakan dalam membentuk kekuatan grassroot atau masyarakat bawah untuk melakukan berbagai monopoli terhadap kekuasaan Negara yang dianggap berlebihan. Civil Society merupakan bingkai pergerakan menuju revolusi oleh masyarakat bawah yang meliputi organisasi-organisasi anonim dan non formal yang terkoordinasi dengan baik. Paradigma pergerakan ini kemudian menjadi semacam harapan dari

³ Mohammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, peng. Franz Magnis-Suseno (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 1

⁴ Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun...* h. 83



kesejahteraan dan terciptanya keadilan yang dilatarbelakangi oleh monopoli control oleh masyarakat dalam suatu Negara.

Konsep Civil Society ini memang mencerminkan radikalisme paling tidak dalam implementasinya di beberapa Negara di barat yang dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa Civil Society harus dipertentangkan dengan Negara. Karl Marx (1818-1883) yang mengikuti pandangan Hegel (1770-1831) berpendapat bahwa negeri tak lain adalah badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Kata Marx adalah suatu ironi apabila Negara yang diidealisasikan sebagai wadah nilai universal, moral dan cita-cita kemasyarakatan ternyata hanya melayani kepentingan manusia secara parsial, yakni individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum. Oleh karena itu Negara harus dihapuskan, atau akan diruntuhkan oleh masyarakat bawah. Ketika Negara telah runtuh dan lenyap, maka yang tinggal hanyalah suatu masyarakat tanpa kelas.

Inti dari konsep ini adalah penolakan terhadap segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Itulah sebabnya Civil Society dianggap sebagai sebuah prasyarat menuju kebebasan, suatu kebebasan yang diartikan sebagai pembebasan terhadap segala dominasi dan hegemoni kekuasaan, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional⁵. Maka disinilah letak kesamaan sekaligus sebagai salah satu jalur untuk menemukan perbedaan dari kedua istilah ini, Masyarakat Madani dan Civil Society. Dalam paradigma kemanusiaan dan agama, Masyarakat Madani identik dengan Masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah, sedangkan pada paradigma politik yang mencakup tatanan politik, mekanisme kontrol dan lain sebagainya, Masyarakat madani identik atau sepadan dengan Civil Society. Maka secara konseptual dan aplikatif, Masyarakat Madani maupun Civil Society dalam

⁵ Lihat Erness Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan* (Bandung: Mizan, 1995)

banyak sisi memiliki makna, esensi dan tujuan yang sama. Kajian tentang kesamaan ini dapat diperoleh secara lebih detil lagi dalam banyak literatur.

Apabila ingin mengkaji konsepsi ini lebih jauh yakni terkait dengan transformasi dan relevansinya, perlu sedikit menilik klasifikasi dari Adam Seligman yang membagi penggunaan istilah ini secara sosiologis menjadi dua⁶. Pertama, Civil Society atau Masyarakat Madani sebagai bentuk atau perwujudan dari system keteraturan kelembagaan, sampai kenegaraan. Secara langsung konsep ini mengarah kepada memperkuat sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, bicara Masyarakat Madani adalah berbicara tentang demokrasi karena kesamaan unsur, esensi dan tujuan. Kedua, Civil Society digambarkan sebagai bentuk kombinasi dari Durkheim tentang Moral Individualism dan konsep Weber tentang Rasionalitas bentuk-bentuk modern dari kelembagaan sosial, yakni berada pada kajian filsafat yang menekankan nilai dan kepercayaan.

Dalam konteks keindonesiaan, terdapat beberapa pandangan terhadap konsep Masyarakat Madani ini. Beberapa kalangan, termasuk juga Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa Masyarakat Madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi agama. Nurcholish Madjid atau Cak Nur, sebagai analis utama dalam kelompok ini mencoba melihat Masyarakat Madani berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah. Menurutnya, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Kalangan lain, seperti misalnya Ryaas Rasyid dan Daniel Dhakidae, mencoba merumuskan Masyarakat Madani memokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hal hubungan masyarakat dengan Negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. Yang menjadi pertanyaan dari masing-masing rumusan ini adalah, bentuk masyarakat ideal atau madani yang digambarkan pada

⁶ A. Qadri Abdillah Azizy, *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta (Kajian Historis-Normatif)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000



rumusan pertama merujuk kepada kultur Islam dan Madinah, sementara contoh tersebut terlihat kurang mencerminkan relevansi dengan Indonesia. Kemudian mengenai rumusan kedua, terdapat pertanyaan mengenai posisi partai politik, kaum elit dan pengusaha dalam ruang Masyarakat Madani yang dimaksud⁷. Secara teoritis, kritik semacam ini hanya ingin mempertegas tentang relevansi, juga integritas suatu rumusan masyarakat yang madani dalam konteks keindonesiaan saja.

Apabila menelusuri lebih jauh, ditemukan suatu kerangka yang lebih kontekstual mengenai hal ini. Seperti Afan Gaffar dalam bukunya Politik Indonesia; Transisi Menuju demokrasi, mencoba mengulas kembali makna Civil Society atau Masyarakat Madani ini dalam upaya mempertemukan kedua rumusan yang telah diulas diatas. Menurutnya, Masyarakat Madani adalah keadaan vertikal (antar lapisan dan kelas), seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan, Kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi.

C. Orde Reformasi: Masyarakat Madani Yang Masih Abu-Abu

Inti dari Masyarakat Madani dalam konteks keindonesiaan adalah bagaimana terbentuknya kontrol masyarakat dalam aktivitas kenegaraan melalui kelembagaan mandiri, juga terbangunnya kemandirian dan otonomisasi sebagai perwujudan dari masyarakat berdemokrasi. Konsep ini kiranya sulit berkembang menjadi paradigma yang mengatur kehidupan berbangsa pada masa Orde Baru, mengingat system pemerintahan yang sentral sehingga semua lini kehidupan masyarakat mendapatkan campur tangan pemerintah. Adanya MUI, KNPI, PWI dan lain sebagainya hanya berstatus organisasi kemasyarakatan dan profesi yang bernaung dalam wadah tunggal yang dikendalikan. hanya beberapa organisasi

⁷ Uraian pemikiran sekaligus kritik terhadap kedua rumusan ini dapat dilihat selengkapnya dalam Iwan Gardono Sujatmiko, *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001



kemasyarakatan saja yang memiliki kemandirian penuh dan menunjukkan diri sebagai kekuatan dari unsur Masyarakat Madani, seperti Nahdlatul Ulama yang dimotori oleh Gus Dur atau Muhammadiyah yang dimotori oleh Amien Rais.

Era reformasi untuk pertama kali menampilkan presiden BJ. Habibie, dengan lontaran-lontaran diskursus mengenai bangunan Masyarakat Madani di Indonesia. Bahkan presiden BJ. Habibie secara eksplisit menguraikan harapannya melalui keppres no. 198 tahun 1998 untuk membentuk suatu lembaga yang bertugas merumuskan dan sekaligus mensosialisasikan Masyarakat Madani. Pemerintahan Orde Baru telah mengabaikan prinsip Masyarakat Madani, tidak tegaknya hukum dan sentralistik, sehingga berpengaruh pada sosialisasi demokrasi dan membentuk masyarakat yang tidak memahami atau buta terhadap demokrasi, politik dan hukum, yang kesemuanya itu termasuk prasyarat dari Masyarakat Madani. Era transisi dalam pemerintahan BJ. Habibie kemudian diwarnai dengan berbagai persoalan, seperti kasus Timor-Timur, ketegangan yang ditimbulkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa ketegangan yang terjadi tidak berada pada ranah wacana politik saja, namun sudah mencapai taraf disintegrasi.

Selanjutnya terlihat dengan jelas, bahwa perspektif Masyarakat Madani atau Civil Society menjadi istilah kebanggaan tersendiri bagi presiden Abdurrahman Wahid, tidak hanya ketika beliau menjabat sebagai presiden, tetapi semenjak memegang kepemimpinan di Nahdlatul Ulama jauh sebelum era reformasi, prinsip masyarakat Ideal Madaniah yang relevan dengan konsepsi Civil Society menjadi diskursus senantiasa diangkat. Gus Dur memiliki pandangan bahwa pluralism wajib dipelihara di negeri ini, dan salah satu cara adalah dengan mewujudkan Masyarakat Madani. Rasulullah telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan beradaban kostmopolitan, yang menghilangkan batasan etnis, pluralisme budaya dan heterogenitas politik. Namun beliau juga beranggapan bahwa keseimbangan tersebut ternyata terganggu dengan mulainya upaya ortodoksi dan formalisme ajaran Islam.



Maka Gus Dur kemudian memposisikan diri sebagai penentang ortodoksi tersebut, yang menurutnya bahwa bermain kelembagaan atau pelebagaan agama dapat merusak keragaman. Naiknya Gus Dur sebagai presiden kemudian memberi ruang yang lebih besar untuk mensosialisasikan Masyarakat Madani ini. Gus Dur mendukung dialog antar agama atau antar imam, bahkan ikut mendirikan sebuah lembaga bernama interfidie, suatu lembaga yang berorientasi pada memupuk saling pengertian antar agama. Pandangannya ini terus menerus dikembangkan, diutarakan dan disalurkan melalui banyak kesempatan, banyak aktivitas baik dalam status guru bangsa maupun sebagai kepala Negara.

Diakui, bahwa konsep Masyarakat Madani adalah perspektif yang dapat melestarikan kehidupan demokrasi Indonesia, namun akan menjadi masalah bagi masyarakat yang belum mengerti benar cara kehidupan berdemokrasi. Masyarakat Madani justru akan menghambat pelestarian budaya demokrasi, dikarenakan perspektif masyarakat tentang demokrasi hanya sebatas alat memperluas kekuasaan semata, tidak pada aturan main pengelolaan kenegaraan. Maka diperlukan suatu pengembangan lembaga-lembaga demokrasi terutama pelebagaan politik, disamping birokrasi efektif yang menjamin keberlangsungan pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris.

Berbicara Masyarakat Madani atau Civil Society akan sama dengan berbicara mengenai demokrasi, juga mengenai topik-topik pluralisme, sekularisasi, agama- negara dan lain sebagainya. Sekarang ini, transformasi budaya dan agama menuju kondisi Masyarakat Madani terbilang menuai hambatan, terbukti dengan tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana bangsa Indonesia dapat menggambarkan bentuk-bentuk tersebut dalam ekspresi moral, kontrol politik dan keseimbangan antara aspek vertikal yang mengandung unsur negara-bangsa, dengan aspek horizontal yang mengandung nilai multikulturalisme. Belum lagi berbicara tentang fenomena perjalanan Negara Indonesia yang saat sekarang ini mencerminkan ketimpangan bahkan kerusakan di segala bidang, terutama



sekali kondisi perpolitikan di Negara kita ini. Sehingga pertanyaan yang mungkin muncul adalah, dimanakah letak Masyarakat Madani ini sesungguhnya. Apakah pada kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU atau Muhammadiyah yang pada sebagian kalangan masih digolongkan sebagai tradisional, ataukah pada golongan akademisi, politikus dan pengusaha, atau mungkin juga terdapat pada golongan masyarakat Facebooker Indonesia yang terbukti mengambil peran dalam Rule Of Law di Negara kita seperti dalam kasus Bibit Candra, Prita hingga Luna Maya, atau justru bangsa Indonesia masih jauh dari prasyarat terciptanya Masyarakat Madani seperti yang diinginkan.

Baik Civil Society maupun Masyarakat Madani, yang terdefinisikan dan disepadankan sesuai dengan konteks kelahiran istilahnya, sesungguhnya demikian jelas menawarkan wawasan alternatif bagi dua pilihan dikotomis yang selalu didengung dengungkan oleh berbagai rezim otoriter di dunia, sistem politik yang sentralistik dan otokratis, atau kekacauan (chaos) yang ditandai oleh anarki, konflik komunal, dan disintegrasi. Justru terhadap perangkat pilihan dikotomi 'semu' seperti inilah konsep Masyarakat Madani menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, karena konsep ini secara tegas mengisyaratkan kemungkinan timbulnya 'kebebasan sipil yang bertanggung jawab, perbedaan pendapat yang nyata, dan pembentukan perserikatan perserikatan secara sukarela, tanpa terkooptasi oleh jaringan jaringan politik resmi. Kini, Indonesia telah satu dasawarsa keluar dari rezim Otoritarianisme-Militeristik Orde Baru, sedang berada dalam orde paling baru yang disebut Reformasi. Dan selama satu dasawarsa pula Indonesia malah terlihat kehilangan arah, mencerminkan wajah demokrasi yang muram durja dengan tubuh kacau balau, malah kemudian terkadang merindukan kondisi masa lalu setelah berupaya keluar dari masa lalu itu. Sekali lagi, dimanakah letak Masyarakat Madani itu sesungguhnya, atau paling tidak, ekspresi dari paradigma yang sudah sekian lama diperjuangkan melalui transformasi di segala bidang. Mungkin sudah saatnya kembali merenungi kemungkinan kemungkinan yang dikatakan tinggi oleh para pakar mengenai



pengejawantahan Masyarakat Madani, paling tidak sebagai sikap akademis untuk turut prihatin atas kondisi yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini.

D. Problematika dalam Aktualisasi

Dengan sangat hati-hati, Nurcholish Madjid mengungkapkan pandangannya tentang sebuah "itikad baik dalam rangka mengimplementasikan konsep Masyarakat Madani dalam makalahnya yang banyak memberikan inspirasi bagi kalangan sesudahnya, Menuju Masyarakat Madani⁸. Dalam makalah itu, secara tegas namun bijak Cak Nur menyampaikan bahwa Masyarakat Madani adalah harapan utama dalam membangun peradaban Indonesia menuju bangsa yang lebih baik; karakter masyarakat yang terbuka, kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang efektif, terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat, bermoral dan religius, yang disimpulkan dalam bangunan masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun disadari bahwa ternyata setelah cukup lama berada pada orde reformasi ini, Negara Indonesia malah semakin terlihat kehilangan arah dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan seperti yang terdengung pada saat awal reformasi atau sesaat pasca Orde Baru. Kekeliruannya kira-kira adalah, berbagai kalangan membayangkan bahwa reformasi sangat dapat menjawab semua persoalan kebangsaan pada saat yang bersamaan. Akibatnya, kita melangkah dengan dugaan-dugaan yang tinggi, dan harapan-harapan yang

⁸ Dalam makalah inilah Cak Nur mensinyalir adanya peluang yang begitu besar dalam rangka mewujudkan Masyarakat Madani yang mencerminkan Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW., sebuah peradaban Islam pertama yang dibangun atas dasar nilai kemanusiaan, pluralisme dan demokratis. Rasulullah telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan peradaban kostmopolitan, yang menghilangkan batasan etnis, pluralisme budaya dan heterogenitas politik. Lihat selengkapnya dalam Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam Sudarno Shobron & Mutohharun (ed.) *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 1999), hlm. 153-165; Lihat pula Jurnal Ulumul Qur'an, vol. III, no. 2/VII, 1996), hlm. 51.-55 Jinan



muluk. Menjadi hal yang diragukan mengenai konsepsi Masyarakat Madani akan dapat terwujud pada suatu bangsa yang tidak benar-benar memahami bagaimana menjalankan demokrasi yang ideal, seperti sebagai prasyarat terciptanya Masyarakat Madani atau civil society.

Di muka telah diuraikan, bahwa secara kongkrit Masyarakat Madani terejawantah melalui adanya lembaga-lembaga sosial yang tidak bersentuhan secara formal dengan politik resmi, sehingga secara terbuka dapat menjadi media control terhadap berjalannya pemerintahan agar sesuai dengan yang diharapkan. Namun pada saat ini, yang terlihat justru antara lembaga-lembaga yang dianggap (atau diharapkan) merepresentasikan Masyarakat Madani, terjadi pergesekan-pergesekan yang semakin tajam. Bahwa ternyata diskursus masyarakat madani hanya sebagai lontaran-lontaran yang berstatus slogan politik belaka.

Inilah sebenarnya akibat dari paradigma berdemokrasi yang tidak benar. Demokrasi dipandang hanya sebagai alat untuk memperluas kekuasaan saja, tidak dianggap sebagai suatu alat untuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan bangsa mandania. Pada saat sekarang ini, tidak begitu jelas ruang-ruang dan komunitas mana yang dapat digolongkan sebagai representasi komunitas kritis dan media control tersebut. Semua lembaga potensial, selain terlihat dapat dirambah oleh kekuatan politik secara berlebihan, juga justru dengan sendirinya berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi secara praktis. Hal ini kemudian mengakibatkan sangat sulitnya mengidentifikasi dimana letak sketsa vertical yang menyangkut agent of control dan stabilisasi politis.

Dengan sangat sederhana, mereka beranggapan bahwa dengan keikutsertaannya dalam jenjang jenjang politik praktis dan kompromi utuh tersebut. memberi ruang untuk memegang kekuatan-kekuatan politis sehingga visi kebangsaan yang teremban dapat terwujudkan lebih cepat. Sebagai suatu ranah yang terpolitisasikan, tentu pemetaan pemikiran dan pergerakan akan terpotong oleh berbagai kepentingan, sebagai resiko dari



politik praktis. Maka fenomena ini kemudian menjadikan semakin menipisnya kekuatan kontrol pos pos mandiri dari kalangan masyarakat, sebagai salah satu bentuk dari bangunan Masyarakat Madani. Ratusan organisasi voluntir segera bermunculan, partai politik yang menjamur, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang semestinya tetap bemuara pada pencerminan awal, yaitu bagaimana Masyarakat Madani mulai merambah kepada realitas kehidupan bernegara, justru semakin menambah kerancuan dan ketidakstabilan saja.

Namun demikian, beberapa yang masih sulit untuk terbantahkan dalam eksistensinya merepresentasikan Masyarakat Madani ini seperti golongan masyarakat akademik, para budayawan, tokoh agama dan lembaga-lembaga pers. Saat ini, deretan golongan golongan ini masih menunjukkan idealitas pemikiran yang tersalurkan melalui berbagai tindakan kritis terhadap berbagai fenomena perpolitikan di tanah air. Kenyataan ini memberikan harapan untuk kelanjutan transformasi agama-budaya hingga politik menuju Masyarakat Madani seperti yang telah dicita-citakan sejak orde baru.

E. Rekonstruksi Paradigma Sosial Politik di Indonesia: Catatan Penutup

Indonesia sering kali diramaikan dengan berita tentang sebuah tindakan mulia dan kritis agama yang tergabung dalam komunitas kerukunan antar umat beragama. Para tokoh Tindakan ini sebenarnya menggambarkan masih adanya tingkat kontrol yang memadai dari masyarakat, khususnya pada jalur tidak formal. Bahkan sepertinya tindakan tindakan atas nama masyarakat semacam ini lebih diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah, karena golongan golongan ini tidak dapat secara formal atau struktur dikendalikan oleh kekuasaannya. Terlihat bagaimana keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi masukan masukan yang mereka lontarkan, meski tidak dapat ditebak secara pasti keseriusan seperti apa, sampai sejauh mana dan dalam sikap politis seperti apa pemerintah memberikan tanggapannya.



Ini berarti, paradigma Masyarakat Madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan, para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh moral force, tokoh-tokoh keagamaan dan kebudayaan. Namun sayangnya, kesadaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal kebangsaan Indonesia, sehingga tindakan yang baru saja mengejutkan serta membanggakan ini mungkin akan jarang kita temukan.

Antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep Masyarakat Madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial, seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Maka pada mulanya, pemahaman akan bagaimana berkehidupan berdemokrasi semestinya harus

tertanam dalam pribadi masing masing warga Negara, sehingga tidak memiliki cara pandang dan bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang pada dasarnya adalah muara serta prasyarat terwujudnya Masyarakat berperadaban atau Masyarakat Madanian.

Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal, tatanan legislasi formal, hukum dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum. Sedangkan dimensi sosial Negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal, antar agama dan budaya, dan dimensi plural yang lainnya. Kedua ranah ini harus terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem koheren namun tidak saling menyentuh secara berlebihan yang menyebabkannya tidak mandiri, ketimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari masing masing ranah ini. Pemegang kebijakan formal yang mencakup tiga bidang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, harus mendapatkan kontrol yang profesional dari masyarakat. Dan masyarakat harus memiliki bekal moral dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memberikan kontrol dalam berjalannya pemerintahan. Selebihnya, masyarakat, atau yang terwakilkan oleh pos pos mandiri yang memegang hak kontrol mereka, harus



mengerti aturan main. Inilah sebagai salah satu cerminan dari Civil Society atau Masyarakat Madani.

Sebenarnya, Masyarakat Madani mengandung berbagai unsur penting yang menyangkut tatanan peradaban masyarakat, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengontrol saja. Namun dalam kasus ini, terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep Masyarakat Madani harus dimulai dari membetuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme, kerjasama antar golongan.

Saat ini, persoalan persoalan birokratis seperti banyaknya Tindakan pemerintah yang menyimpang dari konstitusi, penegakan hukum seperti maraknya kasus korupsi yang belum juga dapat terselesaikan, konflik antar umat beragama, kekerasan dan kejahatan, sampai kepada penyimpangan moral dan kasus-kasus yang lain masih menjadi dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Semestinya masyarakat yang sudah tentu merasakan kegelisahan yang sangat terhadap apa yang mereka lihat dan rasakan dapat terejawantah melalui pergerakan masyarakat madani ini. Jika lembaga-lembaga perwakilan tidak dapat memposisikan diri sebagai pembawa suara rakyat secara jujur dan murni, sudah menjadi tindakan yang tepat, masyarakat emilih ruang ruang publik yang lain yang tidak berada pada jalur formal untuk kembali menyuarakan keinginan dan harapan mereka secara lebih tegas dan berani. Masyarakat Madani memberikan ruang reformasi, maka demikian juga Masyarakat Madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrim yang bernama revolusi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia



Daftar Pustaka

- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Mohammad AS. *Hikam, Demokrasi dan Civil Society*, peng. Franz Magnis-Suseno Jakarta, LP3ES, 1996
- Erness Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung, Mizan, 1995
- A. Qadri Abdillah Azizy, *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta Kajian Historis Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Iwan Gardono Sujatmiko, *Wacana Civil Society di Indonesia*, Jakarta, Penerbit ompas, Jurnal Sosiologi edisi 09 tahun 2001
- Sudarno Shobren & Mutohharun Jinan (ed.) *Islam, Masyarakat Madani dan demokrasi* Surakarta, Muhammadiyah University Press, 1999
- Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah penjajakan awal*, Jurnal Paramadina, vol. 1, no. 2, 1999
- Nurcholish Madjid, *Membangun Masyarakat Madani*, Jurnal Ulumul Qur'an, vol. III, no. 2/VII, 1996)

